

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sekarang ini memprioritaskan desa dalam hal pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberi dana desa yang diambil langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola masyarakat secara mandiri. Kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menggambarkan iktikad Negara untuk mengotonomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah yang bersifat hakiki. Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah dan daerah kepada desa yang biasa disebut desentralisasi.

Diperjelas juga dengan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 bahwa “Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa, yang mana bisa dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memberi amanat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa”. Pelaksanaan Undang-Undang Desa diterapkan mulai tahun 2015.

UU Desa memuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah, setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

**Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Di Indonesia
Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Penyerapan Dana Desa (%)
1	2020	Rp 70 Triliun	99,5
2	2021	Rp 72 Triliun	99,79

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa yang dianggarkan pemerintah di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 70 Triliun dengan tingkat penyerapan dana desa yang telah berhasil dicairkan sebesar 99,5%, kemudian meningkat lagi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp 72Triliun dengan tingkat penyerapan dana desa yang telah berhasil dicairkan sebesar 99,79%. Prestasi tersebut menunjukkan

bahwa tata kelola perangkat desa juga mengalami peningkatan, bahkan cukup signifikan. Anggaran Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa secara khusus diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal pada tahun 2020. Tahun 2017 dari survey di 61.289 desa atau 82% dari total desa, mengalami peningkatan 2.318 desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebanyak 8.305 desa.

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dikatakan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana desa pada tahap kedua yang dikarenakan administrasi yang belum lengkap yang berakibat munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aturan tersebut dijelaskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Namun di sisi lain masih terdapat beberapa permasalahan antara lain penyalahgunaan pada penggunaan dana desa. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Desa, Marwan Jafar (Majalah Dana Desa, 2016) bahwa terdapat desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan kantor desa, atau pagar kantor desa. Hal tersebut tentu tidak benar. Apalagi ada yang menggunakan dana desa untuk membeli mobil. Penyalahgunaan dinilai terjadi karena ketidaksiapan desa

mengelola anggaran. Penggunaan dana desa saat ini diketahui menjadi wewenang penuh para kepala desa, sehingga timbul arogansi soal pengelolaan dana.

Adanya kasus kepala desa yang terlibat penyalahgunaan dana desa, disebabkan ketidaksiapan pemerintah desa mengelola anggaran. Dana besar yang diterima nyatanya tidak bisa dikelola dengan baik, meskipun petunjuk pengalokasian anggaran sudah diberikan. Terkadang masyarakat tidak mengetahui penggunaan dari dana desa yang telah menjadi hak desanya yang seharusnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Padahal dalam Permendesa Nomor 4 tahun 2017 sudah dituliskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat desa (Majalah Dana Desa, 2018).

Meskipun sudah ada aturan tertulis namun tetap masih ada Pemerintah Desa yang tidak melakukan transparansi dalam menggunakan dana desa. Selanjutnya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) pun dinilai menjadi penyebab lain yang membuat kinerja aparat masih kurang. Pengalokasian anggaran yang seharusnya bisa tepat sasaran tidak bisa sesuai dengan petunjuk, karena kurangnya pendidikan. Ketidaksiapan juga disebabkan pendamping desa yang belum berfungsi secara maksimal. Pendamping desa yang seharusnya ikut mengawasi penggunaan dana desa ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan

yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.

Dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Faktor pertama yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Pemanfaatan teknologi informasi ini akan meminimalis kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan yang berkualitas. Dengan menggunakan teknologi informasi termasuk teknologi komputer dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan proses transaksi dan data lainnya, menghitung secara akurat dan menyusun laporan keuangan tepat waktu. Hal ini akan membantu pemerintah mengatasi volume transaksi yang meningkat setiap tahun.

Pemanfaatan teknologi informasi selain digunakan untuk membantu pemerintah desa saat melaksanakan penyelenggaraan dana desa juga membantu pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait dengan dana desa yang sudah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan desa sendiri dapat dilaksanakan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), keluaran yang dihasilkan berupa dokumen administrasi dan laporan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara teori seharusnya dengan adanya sistem teknologi informasi dalam hal ini SISKEUDES maka tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa namun pada kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan yang

mengurangi akuntabilitas itu sendiri. Sehingga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesuksesan penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur desa juga merupakan variabel penting dalam mengelola dana desa. Desa berkewajiban menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban. Kompetensi pemerintah desa ini dapat mencakup pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Hasil penelitian Puspa & Prasetyo (2020), Rismawati (2019), dan Aziiz (2019) kompetensi aparatur desa akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Aparatur desa yang berkompetensi juga akan mengurangi atau mencegah terjadinya fraud yang muncul dalam pengelolaan dana desa.

Kecamatan Bonai Darussalam adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan jumlah penduduk Per 30 September tahun 2021 berjumlah 33.147 jiwa dan luas wilayah 1.213.53 km², Kecamatan Bonai Darussalam memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya. Kecamatan Bonai Darussalam memiliki 7 desa. Berikut ini merupakan Tabel jumlah Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bonai Darussalam:

Tabel 1.2
Jumlah Alokasi Dana Desa pada Tahun 2020-2021
Kecamatan Bonai Darussalam

No	Desa	Jumlah ADD 2020	Jumlah ADD 2021
1.	Teluk Sono	617.761.000	799.757.000
2.	Sontang	655.952.000	781.328.000
3.	Bonai	670.925.000	839.814.000
4.	Rawa Makmur	610.639.000	697.726.000
5.	Pauh	653.043.000	734.476.000
6.	Kasang Padang	626.430.000	678.759.000
7.	Kasang Mungkal	613.061.000	637.761.000
Jumlah		4.447.811.000	5.169.621.00

Sumber: BPMPD, 2021

Alokasi Dana Desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya berbeda-beda dari tahun 2020-2021 dikarenakan alokasi dana desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Seperti terlihat pada tabel 1.1 untuk Desa Teluk Sono jumlah ADD nya dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 617.761.000 namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 799.757.000, begitu juga dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam setiap tahunnya memiliki alokasi dana desa yang bertambah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, ditemukan permasalahan yang menyangkut dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu kurangnya keterampilan pengguna atau pengelola dana desa dalam menggunakan teknologi informasi yang ada, termasuk teknologi komputer dalam pengelolaan

keuangan akan meningkatkan proses transaksi dan data lainnya, sehingga berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang kurang tepat waktu.

Selanjutnya berdasarkan hasil pra survey penelitian di lapangan, permasalahan kompetensi aparatur pengelola dana desa berupa kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya oleh bupati sebagaimana tertuang dalam peraturan desa pasal 6 ayat 3 huruf a dan b yang berbunyi Bupati melakukan pemotongan penyaluran alokasi dana desa dal hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4). Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang dimiliki aparat desa kurang sesuai atau kurang mendukung pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, padahal pengelolaan keuangan desa diperlukan pengetahuan mengenai akuntansi agar mampu dalam menyusun laporan keuangan. Fakta dillapangan seorang bendahara desa hanya memiliki latar belakang pendidikan SLTA yang notabennya kurang mahir dalam penghitungan atau akuntansi, selain itu minimnya pelatihan bagi aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi masalah utama penyebab kurangnya keterampilan yang dimiliki aparatur desa.

Tabel 1.3
Pendidikan Aparatur Desa Kecamatan Bonai Darussalam

No	Desa	Tingkat Pendidikan			Jumlah Total
		SLTA	D3	Sarjana (S1)	
1.	Teluk Sono	5	1	1	7
2.	Sontang	5	-	1	6
3.	Bonai	5	1	1	7
4.	Rawa Makmur	5	-	-	5
5.	Pauh	5		2	7
6.	Kasang Padang	4	-	2	6
7.	Kasang Mungkal	4	1	1	6
Jumlah		33	3	17	53

Sumber: Kantor Kecamatan Bonai Darussalam, 2022

Tabel 1.3 terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur desa adalah SLTA yang tentunya kurang mendukung pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab aparatur desa. Tentunya hal ini menjadi kendala terutama bagi kepala desa, bendahara desa dan sekretaris desa yang memiliki andil besar dalam mengelola keuangan desa, sehingga masalah keterlambatan pelaporan keuangan desa sering tidak bisa dihindari. Pemerintah daerah memiliki peranan dalam memperhatikan mengenai kompetensi pengelola keuangan desa dengan memberikan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan secara detail dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa perlu diberikan sosialisasi atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa.

Dari berbagai permasalahan yang ada, ditemukan permasalahan lain terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang masih lemah berupa yang menyelewengkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 mencapai Rp500 juta dikutip <https://infopublik.id> (2017). Oknum Kades di Kecamatan Bonai Darussalam tersebut dilaporkan Aliansi Masyarakat. Kades juga dilaporkan karena diduga sudah menyelewengkan Silpa ADD senilai Rp77 juta. Dimana saat pencairan uang, oknum Kades ini diindikasikan mencairkan sendiri uang tanpa melibatkan Bendahara Desa. Saat pencairan uang, diduga memalsukan tandatangan Bendahara Desa. Kegiatan itu dilakukan kades tanpa mekanisme pengelolaan dana desa sebagaimana peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan uang desa. Perbuatan Kades itu sebagaimana terdapat dalam laporan Polres Rohul juga melanggar peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua aturan tersebut disebutkan, pengelolaan keuangan atau kegiatan dana desa harus melalui penunjukkan pelaksanaan kegiatan dan melibatkan perangkat desa. Disamping itu Kades dalam mencairkan dana desa tidak melibatkan bendahara desa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI APARATUR PENGELOLA DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BONAI DARUSSALAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang hendak penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam?
2. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diajukan, maka penulis menyelaraskan tujuan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.
3. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pengelola dana berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagi Instansi

Penelitian ini bermanfaat menambah khasanah ilmu bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa serta untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Stakeholder

Penelitian ini sekiranya juga diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Penulis berharap hasil penelitian ini benar-benar berguna bagi keperluan banyak pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang mengambil garis besar penelitian ini.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga memberi manfaat bagi para pembaca.

1.5 Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan sesuai dengan pokok pembahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi konsep-konsep dan teori-teori sebagai pendukung penulisan yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, metode analisis data, definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teoritik dalam Bab II sehingga dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan dahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Teknologi Informasi

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah (Teknologi Informasi). Pada awalnya teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa pra sejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal, mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua, tentang berburu dan binatang buruannya. Sampai saat ini teknologi informasi terus terus berkembang tetapi penyampaian dan bentuknya sudah lebih modern. Menurut Bambang Warsita (2018:135) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Lantip dan Rianto (2017:4) teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Hamzah dan Nina (2018:57) juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Menurut McKeown (2018:10) teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teori yang lain juga diungkapkan oleh Setiawan (2018:2) teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Teori pendukung yang lain menurut Behan dan Holme (2019:31) teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk *me-record*, menyimpan, memproses, mendapat lagi, memancar/mengantarkan dan menerima informasi.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (*hardware, software, useware*) yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas.

2.1.1.1 Fungsi Teknologi Informasi

Fungsi teknologi informasi menurut Sutarman (2019:18) diatas adalah sebagai berikut :

1. Menangkap (*Capture*)

Yaitu merupakan suatu proses penangkapan data yang akan menjadi data masukan.

2. Mengolah (*Processing*)

- a. Mengkomplikasikan catatan rinci dan aktivitas, misalnya menerima input dari *keyboard, scanner, mic* dan sebagainya.

- b. Mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan/pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala data dan informasi.
 - c. *Data processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi
Information processing, suatu aktivitas komputer yang memproses dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe/bentuk yang lain dari informasi.
 - d. *Multimedia system*, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan).
3. Menghasilkan (*Generating*)
Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya.
 4. Menyimpan (*Storage*)
Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya.
 5. Mencari kembali (*Retrival*)
Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data dan informasi yang sudah tersimpan.
 6. Transmisi (*Transmission*)
Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer.

2.1.1.2 Manfaat Teknologi Informasi

Keuntungan dari penerapan teknologi informasi menurut Sutarman (2019:

19) adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan (*Speed*)

Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.

3. Ketepatan (*Precision*)

Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

4. Keandalan (*Reliability*)

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer.

2.1.1.3 Indikator Teknologi Informasi

Teknologi informasi memiliki beberapa indikator utama yang mendukungnya. Indikator yang mendukung teknologi informasi menurut Suyanto (2017:11) diantaranya adalah:

1. Komputer (sistem komputer)

Komputer meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan alat penyimpanan (*storage*). Sistem komputer terdiri dari komputer, *software*, informasi, pemrograman, manusia, dan komunikasi.

2. Komunikasi

Beberapa fasilitas komunikasi yang sering digunakan diantaranya adalah *modem, multiplexer, concentrator, pemroses depan, bridge, gateway, dan network card*.

3. Keterampilan Penggunaan

Semua kemajuan dan perkembangan teknologi yang ada akan sia-sia apabila sumber daya manusia yang ada tidak mampu menguasainya.

Adapun keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui indikator teknologi informasi menurut Setiawan (2018:2) yaitu:

1. Kemanfaatan meliputi:

- a. Menjadi pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*)
- b. Menjadi pekerjaan lebih menyenangkan
- c. Menjadi pekerjaan lebih menarik.

2. Konsekuensi jangka panjang meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas kerja

b. Meningkatkan fleksibilitas pekerjaan

Menurut Darmawan (2018:17), indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi yaitu:

1. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan keefektifan kerja
2. Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu dalam pekerjaan-pekerjaan rutin
3. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kuantitas hasil pekerjaan dengan tingkat usaha yang sama
4. Penggunaan teknologi informasi dapat menjadikan karyawan sebagai orang yang kompeten

2.1.2 Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berfikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Menurut Wibowo (2017:56) kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Menurut Malthis & Jackson (2017:17) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu

bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Moeheriono (2017:3) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan dari definisi ini, maka beberapa makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik dasar (*underlying characteristic*), kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
2. Hubungan kausal (*causally related*), berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja yang tinggi pula (sebagai akibat).
3. Kriteria (*criteria referenced*), yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.

Kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2017:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu. Kompetensi berdasarkan penjelasan beberapa para ahli merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Dari karakteristik dasar tampak tujuan penentuan tingkat kompetensi atau standar kompetensi yang dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan mengategorikan tingkat tinggi atau di bawah rata-rata.

2.1.2.1 Aspek –Aspek Kompetensi

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Soetrisno (2018: 204) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

2. Pemahaman (*understanding*)

Kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.

3. Nilai (*value*)

Suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan

dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).

4. Kemampuan (*skill*)

Sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.

5. Sikap (*attitude*)

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

6. Minat (*interest*)

Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

Menurut Malthis & Jackson (2017:17), aspek-aspek kompetensi terdiri dari:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Indikator pengetahuan (*knowledge*) dalam hal ini adalah, pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan produk atau jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi dan strategi pemasaran.

2. Keterampilan (*Skill*)

Kapasitas khusus untuk memanipulasi suatu objek secara fisik. Indikator keterampilan meliputi keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi dan akuntansi.

3. Kemampuan (*Ability*)

Kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Indikator kemampuan meliputi kemampuan mengelola bisnis, mengambil keputusan, memimpin, mengendalikan, berinovasi, situasi dan perubahan lingkungan bisnis.

2.1.2.3 Indikator Kompetensi

Menurut Malthis & Jackson (2017:17), ada lima indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu yaitu :

1. Keterampilan menjalankan tugas (*Task-skills*), yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja.
2. Keterampilan mengelola tugas (*Task management skills*), yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dipekerjaannya.
3. Keterampilan mengambil tindakan (*Contingency management skills*), yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah di dalam pekerjaan.
4. Keterampilan bekerja sama (*Job role environment skills*), yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja.
5. Keterampilan beradaptasi (*Transfer skill*), yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.

Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi ramping mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Soetrisno (2018: 204) dalam setiap individu seseorang terdapat beberapa indikator kompetensi dasar, yang terdiri atas berikut ini:

1. Watak (*traits*), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu, misalnya percaya diri (*self-confidence*), kontrol diri (*self-control*), ketabahan atau daya tahan (*hardiness*).
2. Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
3. Bawaan (*self-concept*), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.
5. Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental

2.1.3 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Brady & Cronin (2018:12) mengemukakan pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Arifiyadi (2017:17) dalam konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018:3) akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Kusumastuti (2017:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

2.1.3.1 Prinsip dan Jenis Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2011:43), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
3. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Mardiasmo (2018:21) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas

Brady & Cronin (2018:12) mengusulkan lima indikator akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

1. Kejujuran dan hukum diukur dengan:

- a. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Kejujuran merupakan pencatatan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana desa secara benar dan disertai dengan bukti yang mendukung, sedangkan keterbukaan informasi yaitu kemudahan akses informasi oleh masyarakat.

b. Kepatuhan dalam pelaporan

Pencatatan laporan kegiatan desa secara lengkap dalam laporan pertanggung jawaban.

2. Proses diukur dengan:

a. Kesesuaian prosedur

Pelaksanaan program desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Kecukupan informasi

Penyajian laporan keuangan yang berisi semua informasi secara lengkap.

c. Ketepatan penyampaian laporan

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Mardiasmo (2018:21) mengusulkan lima indikator akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

1. Bukti fisik berhubungan dengan aspek fisik gedung yang diperlukan untuk menunjang proses pelayanan publik meliputi; kebersihan bangunan, kenyamanan bangunan dan lainnya.
2. Waktu tunggu yaitu berkaitan dengan kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
3. Sikap yaitu berhubungan dengan kontak personel, sampai sejauh mana mereka berkeinginan untuk membantu masyarakat.
4. Keahlian yaitu berkaitan dengan profesionalisasi dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan pajak.
5. *Integrty*, yaitu kejujuran dan kepercayaan yang diberikan oleh pegawai pajak kepada masyarakat.

2.1.4 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahul yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini diarmgkum dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Karyadi, 2019	Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)	Vaiabel bebas: sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia Variabel tetap: akuntabilitas keuangan desa	Secara parsial sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Secara simultan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa
Atiningsih dan Ningtys, 2019	Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)	Vaiabel bebas: Kompetensi pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal Variabel tetap: Akuntabilitas keuangan desa	Secara parsial dan simultan Kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali
Sugiarti dan yogianto 2017	Analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)	Vaiabel bebas: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran Variabel tetap: Akuntabilitas keuangan desa	Secara parsial dan simultan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

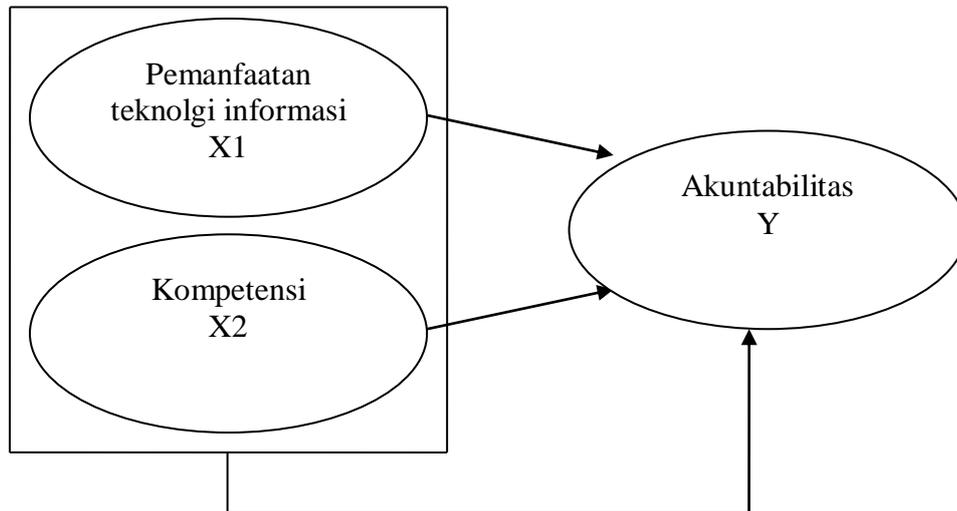
Berlanjut ke hal 31...

...Lanjutan Tabel 2.1

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Daulay 2021	Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Empiris di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lubuk Soting)	Vaiabel bebas: kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi dan sistem pengendalian internal Variabel tetap: akuntabilitas pengelolaan dana desa	1. kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, transparansi dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tambusai Timur 2. Secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lubuk Soting.
Sarah dkk 2020	Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu	Vaiabel bebas: kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal Variabel tetap: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Baik secara parsial maupun simultan kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Aulia, 2018	Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten 50 Kota (Studi Empiris Pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Dan Kecamatan Kapur IX)	Vaiabel bebas: kompetensi aparatur, kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat Variabel tetap: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Baik secara parsial maupun simultan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX

2.2 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini akan dibuat sebuah model bagan agar mudah dipahami sebagai berikut:



Sumber: Sarah dkk (2020)

Gambar 2.1 kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesa yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- H1: Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.
- H2: Diduga kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.
- H3: Diduga pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:74) penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subyek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Setiap melakukan sebuah penelitian selalu dihadapkan pada sumber data tertentu yang diharapkan dapat memberi informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di desa pada Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian pada bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2022.

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik yang ada pada objek penelitian menurut Razak (2015:22). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Bonai Darussalam yaitu sebanyak 253 orang.

3.2.2 Sampel

Menurut Razak (2015:22) sampel merupakan sebagian atau seluruh anggota populasi yang langsung dilibatkan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2016:74) bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian berarti jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 253 orang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari perusahaan berupa data yang dapat dihitung berbentuk angka yang diperoleh dari dokumen atau laporan-laporan.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa pendapat dari responden terhadap pertanyaan dalam bentuk kuesioner.

3.3.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data primer dari penelitian ini yaitu responden yang

memberikan tanggapan dalam kuesioner mengenai variabel-variabel dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah oleh orang lain dan telah dipublikasikan. Data tersebut diperoleh dari buku, laporan instansi terkait maupun dari literatur-literatur yang ada.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini sangat penting karena pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan data tersedia. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan penelitian langsung kelapangan guna mengetahui permasalahan yang terjadi data yang di kumpulkan ini nantinya akan diikutsertakan dalam analisis sebagai bahan *cross check* terhadap angket yang telah disebarkan kepada responden sesuai dengan sampel penelitian.
2. Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang dikirimkan per pos yang diserahkan kepada desponser guna diisi. Alat pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket.

3.5 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen, sedangkan variabel dependennya yaitu akuntabilitas (Y). Untuk lebih jelasnya mengenai definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Jenis Pengukuran
1	Pemanfaatan teknologi informasi (X1)	Setiawan (2018:2) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.	Setiawan (2018:2) yaitu: 3. Kemaunfaatan 4. Konsekuensi jangka panjang	Ordinal
2	Kompetensi aparatur pengelola dana desa (X2)	Malthis & Jakcson (2017:17) kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.	Malthis & Jakcson (2017:17), 1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Kemampuan (<i>skill</i>) 3. Sikap (<i>attitude</i>)	Ordinal

Berlanjut ke hal 37...

...Lanjutan Tabel 3.1

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Jenis Pengukuran
3.	Akuntabilitas (Y)	Mardiasmo (2018:3) Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (<i>disclosure</i>) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Mardiasmo (2018:10): 1. Dapat dipertanggung jawabkan. 2. Memiliki tujuan yang jelas 3. Kesesuaian laporan dengan SAP 4. Dapat dibandingkan	Ordinal

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial (Sugiyono, 2016:384). Untuk melihat sikap responden dalam merespon pertanyaan atau pernyataan yang digunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang didasarkan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang satu kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:132).

Tabel 3.2 skala likert

No	Keterangan	Nilai
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Kurang setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2016:384)

Untuk mengukur nilai variabel penulis menggunakan prosedur pengujian yaitu:

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2017:10). pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara *one shot methode* atau pengukuran sekali saja. Untuk variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.60 (Ghozali (2017:12).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis statistik pada suatu data yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan suatu data pada saat menghimpun jawaban responden. Berikut perhitungan untuk menentukan tentang nilai pada suatu kelas dalam suatu data dengan menggunakan TCR.

$$TCR = \frac{Rs}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden

N = Nilai skor jawaban maksimum

Skor item diperoleh dari perkalian antara skala pernyataan dengan jumlah responden yang menjawab pada nilai tersebut. Sementara skor tertinggi diperoleh dari jumlah nilai skala pertanyaan paling tinggi dikalikan dengan jumlah responden secara keseluruhan. Guna menafsir skor yang diperoleh melalui perhitungan atas kuesioner tersebut, maka untuk mendapatkan persentasenya disesuaikan dengan kriteria yang dikemukakan Tanjung (2016:12) sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Analisis Deskriptif Data

No	Rentang % Skor	Kriteria
1	85 – 100	Sangat baik
2	71 – 84,99	Baik
3	56 – 70,99	Cukup
4	46 – 55,99	Kurang
5	0- 45,99	Kurang sekali

Sumber: Tanjung (2016:12)

3.7.2 Analisis Kuantitatif

3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan penyebaran data melalui sebuah grafik, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada penelitian ini, variabel dependen dan independen berdistribusi normal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal (45°), dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Tanjung, 2013:112).

2. Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multikolinieritas dapat diuji melalui nilai toleransi dengan faktor variasi inflansi (VIF) < 10 , maka model tersebut menunjukkan tidak ada multikolinieritas.

3. Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual data pengamatan yang satu ke data pengamatan yang lain, jika variasi residual maka bersifat homoskedastisitas dan jika berbeda maka bersifat heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.7.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam menganalisis data, metode yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif, untuk menganalisis antar variabel dengan menghubungkan data yang telah diperoleh dari penelitian dan penulis menggunakan regresi linier berganda, dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas
- a = Konstanta
- $b_{1,2}$ = Koefisien regresi
- x_1 = Variabel pemanfaatan teknologi informasi
- x_2 = Variabel kompetensi aparatur desa
- e = *Error disturbances*

3.7.2.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) menjelaskan variabel terikat (dependen) menjelaskan variabel terikat (dependen). Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan informasi, dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 18.

3.7.2.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji parsial t

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerapkan variabel independen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan melakukan perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka setiap variabel bebas yang diteliti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu:

Ho diterima jika : $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikan $> 0,05$

Ho ditolak jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signivikan $< 0,05$

Adapun uji hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk nol atau penolakan dengan hipotesis alternatif atau penerimaan.

H_a : diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig \leq Level signifikan (5%)
artinya ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi

dan kompetensi aparatur pengelola dana desa dan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.

Ho : diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig \geq Level signifikan (5%) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.

2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

$F_{hitung} > F_{tabel} \alpha = 5\%$, maka Ho ditolak, Ha diterima atau variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

$F_{hitung} < F_{tabel} \alpha = 5\%$ maka Ho ditolak atau variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Hipotesis nol (Ho) merupakan model parameter sama dengan nol atau seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) yaitu tidak semua parameter simultan dengan nol atau seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu :

Ho diterima jika : $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikan 0,05

Ha diterima jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikan 0,05

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

H_a Diterima : Apabila F hitung $>$ F tabel, artinya ada pengaruh yang signifikan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pengelola dana desa secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.

H_0 Diterima : Apabila F hitung $<$ F tabel, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pengelola dana desa secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bonai Darussalam.